

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas mengenai relasi kuasa antara Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa atau yang biasa disingkat PKB. Relasi antara Buntet Pesantren dan partai politik di Indonesia sudah terjalin sejak lama. Hingga saat ini masih banyak para politisi dari berbagai corak partai politiknya berkunjung ke Buntet Pesantren untuk meminta dukungan. Para Kiai yang berada di Buntet Pesantren memiliki tamu masing-masing dari berbagai corak partai politiknya. Tidak hanya itu, pejabat daerah hingga pejabat tinggi pun berkunjung ke Buntet Pesantren dengan tujuannya masing-masing.

Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia, oleh karena itu banyak sekali pondok pesantren yang berdiri dari berbagai penjuru negeri. Di Indonesia sendiri terdapat dua basis Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat NU dan Muhammadiyah. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset, Teknologi pondok pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama sebanyak 23.730 yang pesantrennya tersebar di seluruh Indonesia (Kemdikbud.go.id, 2021). Dan 326 pondok pesantren terafiliasi dengan Muhammadiyah yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia (Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 2020). Oleh karena itu, hal ini disadari oleh aktor-aktor politik untuk memanfaatkan basis massa yang besar dalam memperoleh suara, serta partai politik memiliki kecenderungan untuk mendekati diri kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki nilai historis terhadap gerakan sosial keagamaan, sampai saat ini tetap memberikan kontribusi penting di bidang sosial keagamaan. Berdasarkan kurikulum pendidikan, pondok pesantren terbagi tiga, yaitu pesantren tradisional yang biasanya terdapat di daerah-daerah, pesantren modern yang biasa terdapat di kota-kota besar dan pesantren komprehensif (kombinasi) yang tersebar baik di daerah maupun di kota. Masa awal

pertumbuhannya, fungsi utama pondok pesantren adalah menyiapkan santri untuk mendalami dan menguasai ilmu agama Islam, yang diharapkan dapat mencetuskan dan meneruskan perjuangan dakwah ulama serta turut mencerdaskan masyarakat di Indonesia (Usman, 2013). Berkembangnya zaman, pondok pesantren pun mengalami perubahan yang tentunya tidak mengurangi ciri khas dari pesantren itu sendiri. Pondok pesantren di era modern menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang dapat berperan aktif di dalam lingkungan masyarakat modern, melalui fungsi pendidikan, religi, sosial serta penambahan fungsi ekonomi pada pesantren (Maesaroh & Achdiani, 2018).

Kenyataannya, Pondok pesantren kerap kali tidak hanya dipandang sebagai lembaga yang bergerak di bidang agama dan pendidikan saja, namun juga memiliki *power* yang kuat dalam perpolitikan di negeri ini (Ernas & Siregar, 2010). Dalam melaksanakan perannya, pondok pesantren biasanya dipimpin oleh Kiai. Kiai adalah pengasuh sekaligus guru besar di pondok pesantren serta muridnya dipanggil santri. Kiai memiliki peran dalam kancah politik sebagai simpul massa. Pentingnya peranan kiai menjadikan seorang kunci (*key person*) yang dapat didatangi oleh banyak aktor politik (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 309-311). Lahirnya hubungan kiai dengan masyarakat terbentuk dari norma-norma yang diambil dari pemahaman mereka tentang agama, budaya, dan juga adat istiadat.

Kiai turut serta berpolitik, atau sebagai *broker* politik di Indonesia bukanlah suatu fenomena yang baru (Subakir, 2018, p. 2). Sejak era penjajahan hingga pembentukan negara Indonesia, selain mengurus pondok pesantren dan jamaah, kiai memiliki peran yang cukup penting. Di jaman penjajahan mereka terlibat dalam membela tanah air dari para penjajah. Bahkan hingga pemilu 2019 silam, posisi dan peran kiai dalam politik sangat terasa. Harus diakui bahwa peran Kiai dan Ulama dalam politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (negara). Karenanya juga akan diketahui hubungan Islam dengan negara. Sehingga seringkali agama Islam dan para ulama atau kiaiinya larut dalam kepentingan politik negara tersebut (Subakir, 2018, p. 88).

Kiai atau pengasuh pondok pesantren memiliki banyak santri yang idealnya selalu nurut akan perintah gurunya dan bila tidak diperintahkan pun akan mengikuti apa yang dipilih oleh gurunya (Yudhistira, 2019). Hal ini dimanfaatkan oleh para

politisi untuk meminta dukungan berupa dukungan suara. Dengan demikian, pondok pesantren tidak hanya lembaga yang bergerak di bidang agama dan pendidikan saja namun juga turut aktif dalam menyatakan sikap politiknya (Yahya, 2014).

Di Indonesia juga terdapat sebuah fenomena relasi antara kiai dan aktor politik terutama dalam masa-masa pemilihan umum. Ada tiga fenomena yang biasa terjadi dalam masa-masa pemilihan umum. Pertama, adanya fenomena pengambilan sikap yang dilakukan oleh ulama (kiai). Seringkali dalam masa-masa pemilihan umum atau pencalonan presiden selalu didahului dengan kegiatan dukungan atau pengambilan sikap yang dilakukan oleh kiai terhadap aktor politik yang ingin menyalonkan dirinya, seperti para kiai Buntet Pesantren yang sepakat memilih Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 2019 silam (Hidayah, 2019). Bahkan dalam situasi tertentu ulama dapat dijadikan sebagai alat legitimasi (sumber dukungan) oleh aktor politik yang ingin bekerja sama. Kedua, fenomena sowan politik yang dilakukan oleh aktor politik merupakan kunjungan ke pondok pesantren atau massa Islam lainnya, seperti Jokowi sowan ke Pondok Pesantren Bayt Alquran yang dipimpin oleh Quraish Shihab (Candra, 2019). Sowan politik ini kadang juga dilakukan oleh ulama ke pejabat-pejabat tinggi baik pusat maupun daerah. Tindakan tersebut dianggap sebagai pijakan atau strategi perjuangan politik untuk kemaslahatan umat, seperti yang dilakukan oleh Taj Yasin Maimoen yang siap mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jateng 2018 silam (Nurmansyah, 2018). Ketiga, adanya fenomena di kalangan ulama (kiai) atau massa Islam lainnya untuk mencari legitimasi ke pusat kekuasaan jika terjadi konflik (perbedaan) di antara sesamanya. Sebagai kompensasinya, pencarian dukungan pada kekuasaan itu sama saja berarti memberi dukungan pada kekuasaan tanpa melihat bagaimana sistem kekuasaan yang dijalankan. Seringkali konflik kepentingan di antara elit organisasi massa Islam dicarikan legitimasi ke pemerintah, bukan diselesaikan dengan mekanisme demokratik berdasarkan suara dari bawah. Seperti peristiwa usaha pelengseran terhadap Gus Dur (Subakir, 2018, p. 194-195).

Partai Politik merupakan salah satu instrument penting yang digunakan oleh individu dalam mencapai tujuan politiknya baik itu bersifat pribadi, kelompok

ataupun golongan (Haris, 2018). Pondok Buntet Pesantren merupakan pondok pesantren yang terafiliasi oleh Nahdlatul Ulama, dan merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang tentunya memiliki basis massa yang banyak. Basis massanya tersebar di seluruh daerah di Indonesia, sehingga hal ini dinilai sebagai sarana yang mampu memberikan peluang dalam merealisasikan kepentingan politik individu tersebut. Partai politik yang sangat memiliki kedekatan historis dengan NU adalah PKB. Pondok Buntet Pesantren pun memiliki nilai historis dalam pembentukan PKB.

Kedekatan ini terkadang dimanfaatkan oleh individu yang berpengaruh pada partai politik terkait. Selain merekrut orang-orang yang berpengaruh, hal ini dinilai dapat menunjang dalam memperoleh massa yang bisa memajukan partainya. Individu dengan karisma dan ketokohan memberikan pengaruh, serta dapat memberikan dampak positif bagi partai serta menjadi pemimpin yang baik (Haris, 2018).

Partai politik hingga saat ini masih membutuhkan kelompok pendukung berbasis keagamaan. Seperti pada pilpres 2019 silam Partai Gerindra yang mengusung Prabowo meminta dukungan oleh kelompok 212 dan ijtima ulama menjadi oposisi kuat yang memiliki suara banyak dari para jamaah/pengikut dari kelompok keagamaan tersebut (CNN Indonesia, 2022).

Dalam kontestasi politik yang demokratis, baik dalam pemilu maupun Pilkada, sejatinya partai politik menjadi basis relasi antara partai politik dan massa pemilih. Persamaan ideologi antara partai politik dan massa pemilih pada kelompok tertentu menjadikan relasi yang terjalin antara partai politik dan massa pemilih. Momen pemilu merupakan arena strategis partai politik untuk membangun dan memperkuat relasi ideologisnya dengan massa pemilih.

Relasi antara Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah terjalin cukup lama dan mengalami naik turun sejak terbentuknya PKB itu sendiri. Pada masa itu para kiai dan tokoh dari Nahdlatul Ulama ingin memiliki wadah berpolitik aktif (partai), agar para masyarakat dan tokoh NU yang ingin berpolitik secara aktif memiliki partai yang sejalan dengan visi misi dari NU. KH. Adib Rofiuddin Izza hadir pada rapat pertama pembentukan PKB diundang oleh KH. Cholil Bisri. Selain KH. Adib Rofiuddin Izza, kiai yang

berperan dalam pembentukan PKB adalah KH. Fuad Hasyim dan KH. Abdullah Abbas. Bahkan, menurut Abah Imat, di tahun 1999 ada dua Kiai dari Buntet Pesantren yang tergabung dalam kepengurusan PKB yaitu KH. Adib Rofiuddin Izza dan KH. Aris Ni'matullah (Nimatullah, 2022). Jadi, terjalinnya relasi Buntet Pesantren dan PKB sejak awal terbentuknya PKB itu sendiri.

Keluarga Buntet Pesantren yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon adalah Noval Fuad Hasyim pada periode 2009 – 2014. Noval Fuad Hasyim merupakan anak dari KH. Fuad Hasyim yang memiliki relasi erat dengan PKB sejak era Gus Dur.

Berbagai macam kontribusi yang diberikan oleh PKB kepada Buntet Pesantren baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi secara langsung berupa uang yang digunakan untuk kegiatan keagamaan Buntet Pesantren atau fasilitas Pondok Buntet Pesantren, seperti setiap hari santri PKB memberikan bantuan dana untuk kegiatan tersebut. Bantuan tidak langsung berupa lobbying yang dilakukan oleh anggota DPRD kepada Bupati Cirebon untuk kepentingan masyarakat Buntet Pesantren. Pondok Buntet Pesantren juga salah satu penggagas akan terbentuknya UU Pesantren dan Keagamaan yang menitikpkan aspirasi tersebut kepada PKB (Nimatullah, 2022).

Pondok Buntet Pesantren sebagaimana penggagas dari RUU Pesantren dan Keagamaan ini menitikpkan aspirasinya kepada PKB untuk di sahkan menjadi UU Pesantren dan Keagamaan. UU Pesantren dan Keagamaan ini penting sebagai legalitas bahwa negara mengakui kualitas lulusan Pondok Pesantren. Sebagaimana tata cara negara demokrasi untuk mengusulkan sebuah kebijakan (UU), masyarakat atau kelompok kepentingan lainnya memberikan aspirasinya melalui anggota dewan yang tergabung dari beberapa partai-partai. Buntet Pesantren berharap pada PKB untuk bisa mengesahkan RUU Pesantren dan keagamaan.

Masa kampanye pemilu serentak 2019 para politisi sowan ke Pondok Buntet Pesantren, PKB pada khususnya. Mulai dari wakil calon wakil presiden, pimpinan partai, caleg DPR, hingga caleg DPRD. Kunjungan politik ini menciptakan sebuah fenomena patron klien. Terjadi sebuah transaksional antara elite PKB dengan Pondok Buntet Pesantren. Transaksional ini berupa kontribusi yang diberikan oleh PKB dan dukungan dari Buntet Pesantren.

Janji yang diberikan oleh PKB kepada Pondok Buntet Pesantren sebelum pemilu legislatif 2019, menjadi harapan bagi warga Buntet Pesantren dan memberikan kepercayaannya kepada PKB sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Cirebon sendiri memiliki tujuh daerah pemilihan untuk anggota legislatif. Pondok Buntet Pesantren berada di Kecamatan Astanajapura pada daerah pemilihan 7 Kabupaten Cirebon. Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Cirebon dapil 7 berjumlah 6 orang, 2 diantaranya dari fraksi PKB (jariungu.com, 2019).

| No. | Nama | Partai Politik | Jumlah Perolehan Suara |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Mohamad Luthfi, M, Si | Partai Kebangkitan Bangsa | 5.989 |
| 2 | R. Hasan Basori | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.099 |
| 3 | R. Cakra Suseno | Partai Gerakan Indonesia Raya | 7.485 |
| 4 | Abdul Rohman | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4.504 |
| 5 | Yayat Hiadayat | Partai Golongan Karya | 5.977 |
| 6 | Tati Suhaeti | Partai NasDem | 4.514 |

Tabel 1 Nama-Nama Anggota DPRD Terpilih Periode 2019-2024. Sumber: (jariungu.com)

Tidak hanya di wilayah Buntet Pesantren, namun Kabupaten Cirebon pada periode 2019 ini PKB berhasil memenangkan kursi DPRD, yang sebelumnya dipegang oleh PDIP.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 menunjukkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Cirebon berjumlah 50 orang. Partai politik dari setiap anggota yang terpilih adalah:

| No. | Partai Politik | Jumlah Anggota Terpilih |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 11 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 8 |

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 6 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 6 |
| 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 5 |
| 6 | Partai Demokrat | 5 |
| 7 | Partai NasDem | 4 |
| 8 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3 |
| 9 | Partai Bulan Bintang | 1 |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan | 1 |

Table 2 Jumlah Partai Politik yang Terpilih dengan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Periode 2014-2019. Sumber : (Kpu.go.id 2014)

Data KPU Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 menunjukkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Cirebon berjumlah 50 orang. Partai politik dari setiap anggota yang terpilih adalah:

| No. | Partai Politik | Jumlah Anggota Terpilih |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 10 |
| 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 8 |
| 3 | Partai Golongan Karya | 7 |
| 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 7 |
| 5 | Partai NasDem | 7 |
| 6 | Partai Keadilan Sejahtera | 6 |
| 7 | Partai Demokrat | 4 |
| 8 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 |

Table 3 Jumlah Partai Politik yang Terpilih dengan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Periode 2019-2024. Sumber: (Cirebonkab.go.id 2019)

Kedua data diatas menunjukkan perubahan posisi partai politik khususnya pada Partai Kebangkitan Bangsa. Pada data pertama tahun 2014-2019 PKB menempatkan posisi kedua dengan jumlah delapan kursi, lalu periode selanjutnya

2019-2024 PKB mengalami peningkatan menjadi peringkat pertama dengan jumlah sepuluh kursi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya harapan dari masyarakat Pondok Buntet Pesantren dalam janji-janji PKB ketika melakukan kampanye pada pemilu legislatif 2019 silam. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti relasi kuasa antara Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilu legislatif 2019.

Sebelum penelitian dilakukan, banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian sebelumnya mengenai relasi antara Pondok Pesantren dan Partai Politik. Hal ini menjadi sumber informasi bagi penulis untuk membedakan dengan penelitian ini, serta pengetahuan dari penelitian sebelumnya. Studi tentang relasi pondok pesantren dan partai politik pertama kali dilakukan oleh Ramdani (2009) yang berjudul Relasi Partai Politik dengan Pondok Pesantren (Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir Kabupaten Bogor). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, relasi antara Pondok Pesantren Daruttafsir dengan PPP, dihasilkan dari relasi personal antara Pondok Pesantren Daruttafsir dan calon Bupati Bogor Periode 2009-2013. Artinya Relasi Pondok Pesantren dan Partai Politik terbentuk dilatarbelakangi tokoh keduanya yang memiliki relasi (Ramdani, 2009).

Sedangkan menurut Fahmi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul, Relasi Partai Politik Dengan Basis Massa (Studi Kasus Partai Persatuan Bangsa Kabupaten Rembang dengan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang). Dengan teori interaksi simbolik, Fahmi menemukan bahwa relasi antara pondok pesantren dan partai politik karena adanya tokoh pesantren yang menjadi anggota partai politik yang memiliki relasi tersebut. Dalam hal ini, KH. Maimoen Zubair yang menjabat sebagai Dewan Syariah Pusat PPP, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Keuntungan yang didapat adalah PPP adalah mendapatkan dukungan dari pesantren (basis massa) dan keuntungan bagi pesantren adalah dalam mengawasi PPP dapat mengamalkan *amar maruf nahi munkar* (Fahmi, 2014).

Penelitian terdahulu lainnya adalah Patronase dan Afiliasi Santri Pada Partai Politik di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara. Haris (2018) melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan teori patronase, Haris menemukan bahwa relasi

pesantren dan partai politik dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik dan ideologi agama Islam (Haris, 2018).

Namun, Muslihudin (2013) memiliki pendapat yang berbeda bahwa tidak hanya dengan ideologi Islam saja pondok pesantren memiliki relasi dengan partai politik. Dalam penelitiannya yang berjudul Model Pesantren Kader; Relasi Ideologis PP Husnul Khotimah dengan PKS, serta Artikulasinya dalam Kegiatan Kepesantrenan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa relasi antara pondok pesantren dan partai politik karena faktor historis pondok pesantren berdiri dengan ciri khas partai politiknya. (Muslihudin, 2013)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu diatas. Menurut penulis tidak hanya ideologi agama Islam, relasi antara tokoh agama dengan politisi, dan kepentingan politik semata, namun adanya aspek sejarah, budaya dan ekonomi yang dapat menimbulkan relasi dari pondok pesantren dan partai politik. Pada penelitian ini melihat sebuah fenomena patronase dan klientelisme antara Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kuatnya *power* politik dan pendidikan Buntet Pesantren serta besarnya karisma Kiai Buntet Pesantren menjadikannya K. Tidak hanya dimata santri dan masyarakat umum, namun politisi PKB juga memandang kiai sebagai panutan yang berdampak pada politisi PKB untuk menjalin sebuah relasi dengan Buntet Pesantren. Selain itu, adanya transaksi positif yang terjadi dalam terbentuknya relasi. Transaksi tersebut berupa kontribusi yang diberikan oleh PKB kepada Pondok Buntet Pesantren yang dialokasikan untuk kepentingan pesantren serta masyarakat disekitarnya, pun Pondok Buntet Pesantren yang memberikan kontribusi berupa suara kepada PKB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dimuat diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana relasi antara Pondok Buntet Pesantren dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dimuat penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat untuk menguji serta menganalisis dari rumusan masalah yang dimuat diatas adalah untuk mengetahui bagaimana relasi antara Pondok Buntet Pesantren dengan Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memabawa manfaat bagi para pembaca untuk menunjang perkembangan Ilmu Politik pada umumnya dan secara khusus perkembangan Ilmu Politik mengenai Relasi Kuasa.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi partai politik dalam menjalankan strategi untuk membangun relasi kuasa yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan petunjuk bagi para pembaca terutama konstituen dalam mengetahui proses demokrasi pemilihan umum dan dapat membuka pemikiran untuk memilih anggota dewan yang dapat menyalurkan aspirasi warganya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca, maka diperlukan susunan yang sistematis dalam penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini tertuang pada bab-bab berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama, didahulukan dengan pendahuluan yaitu merupakan tulisan yang berfungsi sebagai acuan pembahasan bab-bab selanjutnya, sekaligus menguraikan isi skripsi ini secara makro hingga mikro. Bab ini mencakup, latar belakang masalah mengenai latar belakang secara global pondok pesantren, hingga fokus kepada studi kasus Pondok Buntet Pesantren, juga partai politik secara global, hingga fokus kepada Partai Kebangkitan

Bangsa, serta menguraikan relasi dari keduanya. Pembatasan dan perumusan masalah penelitian, penelitian terdahulu agar menjadi acuan pembeda dari peneliti ini. Lalu, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian teoritis sehubungan dengan judul skripsi yang ditulis. Memberikan penjelasan tentang konsep dan teori penelitian. Dengan penjelasan mengenai partai politik dan relasi kuasa, serta kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri atas objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknis analisis data, dan tabel rencana waktu penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang berisi analisa tentang relasi antara Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Legislatif 2019 karena mengalami peningkatan posisi pada partai politik, serta deskripsi dari dua objek penelitian Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa. Data penelitian yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara narasumber dan data sekunder diperoleh dari jurnal, skripsi, dan berita sebagai penunjang untuk memperluas data utama. Pada bab ini juga berisi tentang analisa dari data penelitian yang sudah diperoleh penulis.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian terkait dari pembahasan yang dilakukan dalam penelitian tersebut.